



## WALIKOTA BANJARBARU

### PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 07 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### PROSEDUR DAN TATA CARA PENGELOJAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

#### DENGAN RAHMAT TUHAN ANG MAHA ESA

#### WALIKOTA BANJARBARU

- kickimbang
- a. hohwa batlasarkan Peraturan Mental 17alam Ncgcn Namur 59 Tabun 2007 lelutng Peruhahan Alas Per.nuran Nlenterl ( )atm° Negerl Namur 13 Tatum 2906 tentang Petkamin Pcngclolaan Keuangan Daerah. lsebnja hibah digunakan untuk nivitgainggarkan panbcrlan hllsah dalam bcntuk uang, batting dan'atau jasa kepada pemerlnlah area pcincrlntah daerah lnlnnya. penasahaan diterah. massarakat Jan organisasi kentasyrakatan yang Seatlll spcsflk tetah dltcrapkan pemtukarlinsa. dun hclanja hanivan soda! digunakan untuk meneanggarkan pcinticeian tonna(' yang hersllal aortal kcnlas>arakakul dalam twntuk uang darratau hanuig kepallit kekimpoLanggota lnasyaraktit. dan panal politik:
- h. ludiwa berdaturkan penlnitongan schagalniana dlrrutksud dal= hunt a dl lslsls penu mengatur prosedul 'Lan tam can pengclolaan hclanja hibah 'Jan belanja hantuan sostul dl ling)tungan Peincrlntah Kota Hanjarbartl dengan Peraturan 1A'alikiia.
- Mcsngat
- l. kndangllndang Nomor 9 Tabun 1999 lashing Pendentukan Kohultaly a Dacrab Tlngkal ll llnlarbaru (l.crab:lrn Neganl Republik Indonesia Tabun 1994 Nomor 43. lanthahan lends:wan Negara Republik Indonesia Nomor 11122):
2. Undang-Undang Nomor 28 1 ahun 1999 lentang Pcnyclungsansart Negara Yang Booth dan lktne. Jan Korupsi. Kolusi dan Ncrulisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 1 dim 1999 Nomor 75. Tainhahan Lanham Negara Republik Indonesia Nonwr IRS! I.
3. Undang-llnitang Nomor 17 Tabun 2003 tentanp Kenny= Ncgain 1Tembartul NOW1/11 Republik Indonesia Tabun 2003 Noino/ 47, lanthuhan l cmlsanin Keg= Republik Indonesia Nomor 421361;
4. (inking-llndang Norm 1 Tabun 2004 tenting Perbendaluaan Negara l llnbaran Negara Republik Indonesia Vahan 2004 Nowt 5. l ambahan Lc-mbaran Ncgara ltcjniblik Indonesia Noinur 4355);
5. l ndangitindang Nmnr 15 Vahan 2004 icniang Pcncrlktaan Pcngclolaan dan Tanggung Jawab Keuantgan Ncgam (Lembaran New° Republik Indonesia l ahun 2004 Nomor 66. Tamhthan Lanham, Negara Republik Indonesia Nomor 4400):

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2004 (Sj/Him 125). Perubahan Negara Republik Indonesia /Omar 44371 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44380).
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44380.
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 45781;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21X/7 Nomor K2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47371.
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru dan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor San I I.
- C. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor II Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor I 1 Seri D Nomor Seri 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

BAB I  
KETENTUAN AWAL

Pasal I

Dalam Penjelasan Walikota yang dimaksud dengan

1. Wilayah adalah Kota Banjarbaru
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru beserta Perangkat Daerah sebagai pembantu dan pembantu pelaksana Pemerintah Daerah
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru yang diiklanannya disingkirkan APAD adalah **Malta iClant.111** tahunan Pemerintahan Daerah yang dihas dan disetujui bersama it+

1. Ensiklopedia Daerah dan Laporan Perwakilan Rakyat 11 Tahun 1999 dan ditandatangani oleh Pemerintah Daerah
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah pejabat daerah pada pemerintahan daerah, daerah selaku pemerintah yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah
  6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Kantor Kecamatan Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara pertama/Myang. (Warna hal ini Dina. Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekuasaan Daerah)
  7. Dina, Pemerintahan. Pengelolaan Keuangan dan Belanja Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Anggaran Daerah Kota Balikpapan
  8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan rencana pelaksanaan anggaran Walikota dan mengkoordinasikan Walikota dalam penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan
  9. Satuan Kerja Pengawasan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan
  10. Kegiatan adalah fungsi Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
  11. Pejabat *Keuangan Sotakan Kwaja* Panto: Kepala Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat AMA PPK-SKPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi dan tugas keuangan daerah pada Swam Keno Pengelola Keuangan Daerah
  12. Bendahara Pertama Daerah yang selanjutnya disingkat DU) adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara pertama daerah
  13. Kepala Bendahara Pertama MIMM Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bendahara Pertama) adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan wewenang sebagai bendahara pertama daerah
  14. Bendahara Pertama Daerah adalah pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagai bendahara pertama daerah dalam rangka pelaksanaan APBD Kota Balikpapan
  15. Surat Permintaan Pembayaran langsung yang selanjutnya disingkat SPP-ITS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk pencairan pembayaran langsung kepada pihak ketiga.
  16. Surat Perintah Permintaan Anggaran yang selanjutnya disingkat SPAT'S adalah dokumen yang diterbitkan oleh bendahara anggaran pengguna anggaran untuk pencairan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPKD kepada pihak ketiga.
  17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan Dana yang diterbitkan oleh DU) berdasarkan SIM
  18. Ilibah adalah istilah yang menunjukkan bugi pemerintah daerah, baik bersifat nilai uang, tuning dan lain-lain yang dapat menimbulkan kerugian pemerintah, perusahaan, masyarakat (dan lain-lain) yang selanjutnya disingkat dengan tujuan tertentu.
  19. Dunia Bantuan Sosial adalah permintaan bantuan dari masyarakat yang diajukan oleh kelompok masyarakat atau individu dan instansi Kota Balikpapan dan sekitarnya.
  20. Unit Pelayanan Masyarakat adalah unit yang dibentuk untuk melaksanakan pelayanan masyarakat dan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.

**BARB**  
**1118AII**

**Unisn Knouts**  
**IAjjaan Pemberian Ilthah**

2

- 1.1) Haub kersada pemerintah atasi pemerintah Jacdr lamna benujuari amok menunjang peningkatan pelayanan masyarakat di daerah dan tasanan & sar umum.

12) Hibah kepada perusahaan daerah hertutan anul tocnumang pningknan pelayanan kepaJa  
nuksarakai  
Haub kepacla tnasyrtralsai Jan loganisasi kcmasyarukatan hemutuun untuk mcrungkatkao  
partikipasi pcn)clengganun pcmhangutun dachn auu sceara funpional terkatt dcngan dukungan  
pcnyelengngansan pemaintaltan dactalt

**Magian huhu**  
**Anazarvn Pclakunaan dan Pertangettogran 'than**

**Pam! 3**

lithah dalam hcntul u.vtg dianggartsut pada lxtutjo Sattkut **KCfjj Prngelola** Ktuangan Dacrah  
pada kclompok 13clania 1 idak Langsung.  
lilihah tlahun hentuk banutgjijaka diangistrkan dalam hentuk program Jan kcgiatan "lab SKID  
amu Raglan dalato ketompok lletanja t.angsung

**Paw!**

Penyalunn !Shah dalam hentuk wing setvgaimana dimaksud dalant Pasal 3 ayat 11) dilakutan  
melalto truster dana tonal kepada pchnerinta  
Datum hal pcnenma hibah melakukun pcngadaan haunt: nuts jam. maka pcngadaan *Malang atau*  
 *jasa* trrschut Jlaksanaanal scsuai tkngan perundang-kusdangan yang berlaku.

**Pasal 5**

Pcmherian hibah datum bentuk Jiang dtpcmanggunngjasabian olch pcncnma hibuh scsulti .thjcl  
dan menyampaikun laporan rcalisasi penggunaan Jana kcpsda Walikom  
1)inas Pentlaggoan. Pcngclolaan Kettangan  *dan* Asset Macralt. thlengkapi dcngan hukti-buku  
Jukung lainnya yang sah 1:CfUal naskah perjanjian hi bah dan postural peruntlang-undangan yang  
hcriaku.  
Pemberian lohalt dal.= hcntuk hruang auu )ass tlipcmanzgunngjansabkan olch puserima hibah  
herdasarLut !scrim avant **serail** trcima haring .nau j.aaa Jan pengszunaan atau pc:mania:man hams  
sesuai dengan naskah peramjian hibah.

**Pasal 6**

IScpala SKPI) atau Magian yang trkrait ikut bcnanggunngiusab scjak pengusulan behuua hibah  
stompoi pada laporan pertanggungjawahan balm\*a hiluth dan pcncnma hibah Nampo ohjck  
pancritsa wajib mcrniscrtwargungntakkablkan pcnggunaan dana kepada Walikota melalui Dinars  
Pcndapatan. Pengelolaan Kcuangan dan Asset 1>aertsh.  
Jika pcnemma hibah tidak mcnyampaikan laporan pertanggungjansattan sesuat ketentuan yang  
berlaku maka :  
a. amok Sun selanininya pengartom pcnnohonan yang diusulkan Islak alum dipertinthangkan  
untuk chlantutkzuv  
b.scmua hal-hal yang mcnyangkut pcmanggunngjawatxm pcngguraupetnanfaatan lohatt  
mempakan tangguny jawab pone mu lnhah

**Ration Kellam**  
**Tata Can Penaajuan Usulan Anggaran**

**Paull 7**

(1) SKID atau (Ma)an pada tickroariai 1")arnsh Kota mcogajukan issulan hihah  
sestut lugas  *dan* l ungsin)a atas usul pcnurinta handl kcpula l API> taclatui Dins Pcndapatan.  
Pcngckslaan Kcuangan dan Asset 1)acrah untuk ponhalusan

12: Usidan Intuit yang telah disetujui akan ditampung. **Permit: In Dacrah taming Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul** dan **Relimia DaumIt dan selanjutnya dituangkan dalam DPA-SKPKILDPI (ASKPIC I)**.

Raglan Krynipat  
Mencara Prognosis SPP. SIPA). (Ia Pr rcairan SP21)

#### PaatS

- (1) flowithara Pengeluaran pada SKPKI) mengaiukan SPP-LS betela dokumcn kelengkapannya kepada Dina Pcndapatan. Pengclolaa Kruanyan dan Asset I Mural, untuk ditcrbithan SPM-L.S.
- (2) Dok Lunen kelengkapan sebacalmium dirnalistid Aida ayat II terdiri dari :  
persetujuan Walikota atau Rencana Anggaran Belanja (RAIB) dari pemohon yang monima hibah alas usul. ntKOMERSDAM Jan Man atau Bagian:  
11. **adan,a** swimsuit pengum'sekretariat pncrinta  
c. adanya Surat Kt: pitman Walikota penerima hibah:  
11. musks(' perjanitan hits: 4h sekurang-kurangnya metnuat identuas pncnina Utah. tujuan  
prink-Pan Utah. tunilah uang yang thhihallkan Jan ditluxLstangant inch Walikota (a: bawd  
Pihak Penanut. atau diatur berdasarkan perundone-undangan dengan pncrima hibah settagini  
Mimi kcdua. yang (Malin nuntliap 2 (dual mating-ma-sing Minoan-raj cukup.  
(3) SPM disampaikan kepada kuasa Brodalyara (tmum I 3as-rah untuk ditcrhitkan SP2D.  
(4) SP2I) sebgainitum dimaksud pada ayat oleh licndahara Pcmglclum akan disalurkan dengan  
cam namiransfer ke relycning pncrima hibah sevara tunai

#### halal 9

- (1) Pncntima hibah wajah rra-nyampadan pertanggungmaban penggunaan data hbah kcpada  
Waltlitta niclalui SKR() atm bagian terkait schanyk rangkap 2 (dual. ash disampaikan kepada  
Dinar Pcnlapainn. Pengclolacm Kcitangan Jan Asset Dacrah schunhai- lambatnya I (satin Milan  
tetclah kegiatan +classy  
(21 littlish yang diI, cnkan sacra tyznahap akan diproses sctclah pncncrtia incnyampaikan laponin  
perlangramgjawahm pent:gum hibah taltap selschunnya

### BAB III BAN It SWUM.

#### Raglan Knatu Permohonan Prwrtujuan

#### Paint III

- (1) Schap inganisasiSanggina masyarakat Jan partaz politik yang berada di splay ah Kota **Ilanjarbam**  
(twat mengniukan pncnoolumanpropyrial kepada Prinurrintah Kota Dania: barn.  
(2) (kgnisasianggota masyunikat Jan partai politik yang Lauda di Mar wilayah **NOM I1anjarhwu**  
lidak **IchosSUI** di datum Nnitutun ini kNuali mendapat peraaajuan dari Walikota

#### Paul II

Schap organtsiasianggoia **1113A>aftli.41** (Lyn partai politik dapat inengajukan pentohonanpropotal  
kcpada Pcncrintah Nina Ilan)arlstru mclalui Walikota thitgan mclongkapr pcssyaran se-bac:al beam:  
u. susunan organisasitkepsmgurusanitcpamtiaan;  
h. pemmlinnan harm dibuahi cap sit-tripe( organisasiipanitio.

- c. permoluairproposol dikcinhui dan diundatangani ale, :
1. Ikkan I akuluksItepato Sckobb valid hanium pcndidikan.
  2. Ketua dan Sckretaris tutuk Baurbut Oreanikasi Kernasyarokaran. Prides' dun horror:
  3. Kctua Jan I.urah mtcmpai untuk Minium Rumab lhodah. Perkumpulan Kcagamaan lainnya.
- d. balutran barn dapat dircalisisikan stick!, menclapat persouruan tenulis dari pahat yang berwertang sclera dirty iesk olch 1 bit Relay:man Barman.
- e. jumlah dam bantam mond yang disctujui olch porahat yang bcnkcnong kurang dan Rp. 10.001).(200.00 iscpulub juto rupiah) akan ditairna Iangsung olch pcmolum don Rendamra Pcneclumin SKPK1).
- jundah drum bantam sumal yang dtm-tujui olth perabui yang Ix-men:trig M11111 dcngan luau !chili dui Rp 10.000.000,00 (scputuh pita rupiah) akan dirrolimarkan dcngan cam transfer ke rekening hank pcmohon.

Raglan Kerbs.  
Prokedur din Proanegunzjou Alban

Plural 12

- 11 Pcnt-rima **dal** Fannon sosial menandaratrani hcrita acara krintran dan kuitami.
- (2) Pcnrcrinta dana bonbon sonar waiih nar nyampaikan laporan pcnggunaan **dana** sehagai penanggungjaoalkan yang dilengkapi dcngan brukti dukung yang sah kepada Walikota umiak, Ulnas Pendapaituk Pengelulaan Keuangan Jan Assn (bend'.
- 01 Batas kvaktu pcnyampaian !spoon pengsurraan Jana sclamfro•landkatnya 15 Ilima Mak/ Fan redlining sejak ianggal tcrima drum

Pam' 13

- Jska pcncrima Ilaniutur Storni Palk nvenyampaikan laporan pcnanggungjaoahan bcruapa Flubs dukung. kuitanki hermatcrai.nou don bukti scror pujak sit taporan Ierluli, dan tutak wakin yang idalt &unapt:tn. maka
- a. tuturk urban mcmlaiang ;vibration pomohonan yang drustilbui tidal akan drpenimbangan untuk dilaniulkan.
- h. ,**CMULI** hal-hal yang nrcoyangkut pertanggungjawalmn pcngginnunlpemanfzumin Inuttuan sosial mendukan tongguny. jawab pcncrima banivan susial

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENLTUP**

Pawl

- 11 Habib) yang hclum cukup diatur dalam Pouturan Walikuta ini akan awn: Iamb lanita tkngan Keprousan Walikow.
- 1B Dengan hcrlaktutya Peraturan U'alikuta ini make Pemiuran Walikoto tlanjarhana Nomor 26 Tabun 20071 renting Sistcru dan Mckanomc Dana Ftantuan Somal 1)1 langkungan Pancrintah Kota Banjarluru I Ikrila lbcrach Kota haniarturu Tabun 20011 **NOM( 26** Nomor Seri 13) dan Pt-cranium Walikina Bonjarburta Nomor 2 Tatum 2009 taming Pent/Ordinal tklzuna Hitch (Devito 1)acrah Kola lianjarbaru [shun 2009 Norton 2 Seri E Nomor Scri I dicabut dan dinyulakan lidak bcrlaku

**Paul is**

Peraturan Walikota ini ntulai hettaku pada langgal diundangbut

Agar actiap *orang* dapat mcngdahuinya. rrimcrrinialikan pengundanium Peraturan Waliltota ini &apart penempatannya dalam Berlia Dacruh Kota Baniarbaru.

DitetapLan di Banjathdru  
Pada <sup>11</sup>0Kgal 1 .<.:.,.r. 2011

**WALIKOTA RANJARBAR1A**

IL

Diundangkan di Barkiarbaru  
pada tangpl jo;r...z.zr1 2011

**M. RUZAIDIN OOR**  
f

**SKKRFFI**



11. **AIIRIAN1**



**IIIRITAIDAFRAII KOTA RANJARRARU TMR1N 2011 NOMOR f**